BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 *United Nations of Children's Fund* (UNICEF)

3.1.1.1 Sejarah UNICEF

UNICEF adalah organisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II dalam rangka untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak di Eropa. Pada tahun 1953, UNICEF menjadi badan tetap dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Enam tahun kemudian, sidang umum PBB mensahkan Deklarasi Hak Anak, yang dokumen dan mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan seperti gizi, pendidikan dan tempat tinggal. Pada bulan Desember 1950, majelis Umum PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya dinegara-negara yang sedang berkembang hingga akhirnya, pada bulan Oktober 1953, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF ditetapkan menjadi suatu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak. UNICEF kemudian lebih dikenal sebagai *United Nations Children's Fund.*

UNICEF dibangun dalam rangka untuk merawat anak-anak di seluruh dunia dan bekerja pada menyelesaikan masalah-masalah seperti kekerasan terhadap anak.

UNICEF mendukung gagasan bahwa agar seorang anak memiliki masa depan yang kuat, mereka membutuhkan kualitas awal untuk kehidupannya. Semenjak saat itu gagasan lain mengenai cara-cara perlindungan terhadap anak-anak mulai dilakukan termasuk diantaranya mendirikan suatu lembaga khusus yang menangani anak-anak. Pada awal tahun pembentukannya, sumber-sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak korban perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang pangan atau pakaian di Eropa dan Cina. Pada bulan desember 1950, Sidang Umum PBB mengubah mandat organisasi ini untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dari sekian anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara berkembang.

Kemudian sekitar akhir tahun 1953, sidang umum memutuskan bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Badan ini kemudian disebut the "*United Nations Children's Fund*" (Dana PBB untuk anak-anak). UNICEF berupaya melalui berbagai kegiatannya untuk melindungi anak-anak dan memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan potensinya secara penuh. Pemberian nobel kepada UNICEF pada tahun 1965 merupakan salah satu bukti tindakan langsung dari dunia internasional terhadap kepedulian dan pengakuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dunia itu sendiri (http://www.unicef.org/about/index.html).

3.1.1.2 Fungsi UNICEF

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
b. Memberi advise dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
c. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara.
d. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
e. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
f. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan (UNICEF,2009: 2).

Melihat fungsi-fungsi tersebut, nampak bahwa UNICEF sangat perduli dengan kaum anak-anak. UNICEF melihat situasi anak-anak dari tiap negara berbeda-beda. Antara kesejahteraan anak-anak di negara berkembang sangat berbeda dengan kesejahteraan anak-anak di negara maju. Hal-hal ini selalu berkaitan baik dengan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian negara bersangkutan. Oleh karena itu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang lebih mendapatkan perhatian khusus

oleh UNICEF untuk dapat melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan keseimbangan tersebut dalam menangani masalah seputar anak.

UNICEF ini adalah sebuah organisasi anak perusahaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia II pada bulan Desember 1946. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Fungsi UNICEF ini yaitu, Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Dasar untuk dunia, Meningkatkan tingkat Anak Hidup di negara berkembang, Kesetaraan jender melalui pendidikan bagi anak perempuan, Perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, Melindungi dan advokasi hak anak. Imunisasi bayi dari berbagai penyakit. Penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak.

Pengembangan Analisis Situasi Anak dan Wanita adalah fungsi sentral dari mandat UNICEF. Ini adalah output program yang sangat mendukung upaya nasional dan lembaga ini, yang juga bagian dari upaya menyeluruh PBB untuk mendukung kapasitas nasional untuk mempromosikan pembangunan manusia dan memenuhi hak asasi warga negara. Pengkajian dan analisis menunjukkan dimensi anak relevan dari masalah pembangunan nasional dan merupakan skema dari tindakan prioritas yang terus berkelanjutan. Upaya ini didukung dengan promosi dan penggunaan data analisis studi kualitatif dari pemerintah dan masyarakat sipil yang merupakan mitra kerjasama pembangunan internasional (http://www.unicef.org/sitan/index_43348. html diakses 8/12/12).

3.1.1.3 Misi UNICEF

Adapun misi dari organisasi UNICEF, antara lain:

1. Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia.
2. Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, UNICEF banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun.
3. Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara, khususnya kemauan dari negara berkembang.
4. Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan, kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.
5. Melalui Konvensi Hak Anak juga berusaha menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap perilaku anak-anak. UNICEF juga menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemajuan manusia itu sendiri (http://www.unicef.org/media/media_359088.html).

3.1.1.4 Tujuan UNICEF

Tujuan UNICEF yaitu *Pertama,* menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak diseluruh dunia yaitu kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 dan mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan demi pembangunan nasional di tiap-tiap negara. *Kedua*, memberikan perhatian pada perkembangan anak terutama di negara berkembang, dimana menekankan kepada pemerintah negara berkembang harus memiliki kebijakan jangka panjang bagi anak-anak dan kaum muda di negaranya untuk meningkatkan kondisi anak-anak yang harus didukung dengan strategi pembangunan internasional.

Ketiga, memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan-kebutuhan dasar anak agar mereka dapat mencapai potensi yang maksimal terutama pada anak-anak yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai, bencana alam, atau korban dari kebijakan domestic yang diberlakukan, serta bagi anak-anak yang memiliki keterbatasab fisik dan mental.

Keempat, pengalaman UNICEF dalam menyusun kebijakan dan program-programm yang terkait dengan anak-anak dapat berguna dalam proses penyusunan target dan prinsip global bidang ekonomi dan sosial, serta dalam menyiapkan strategi-strategi pembangunan.

Kelima, dapat merealisasikan hak anak dan perempuan didunia sebagaimana tercantum dalam *Convention of the Rights of Children* (CRC) dan *Convention on Elimination of all forms of discriminations Against Women* (CEDAW)

(http://www.unicef.org/infobycountry/china_statistics.htm diakses tanggal 14/12/12 pada 10.03 WIB).

3.1.1.5 Struktur UNICEF

Untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi, UNICEF mempunyai 11 struktur utama organisasi (Data: UNICEF,2009). Adapun kesebelas struktur utama organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Badan Eksekutif

Badan eksekutif ini terdiri dari 41 anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa 3 tahun dan memiliki wewenang:

1. Meninjau pekerjaan dan prospek kerja dari organisasi.
2. Menentukan kebijakan-kebijakan.
3. Memberikan persetujuan pada rencana jangka panjang dan menengah organisasi.
4. Memberikan usul-usul dan membuat komitmen untuk kerjasama dan pembiayaan.
5. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB.
6. Memberi persetujuan pada laporan keuangan.
7. Mengatur dan melaksanakan usaha pencarian dana untuk administrasi dengan program organisasi.

b. Direktur Eksekutif

Badan eksekutif ditingkat kantor pusat (New York, Jenewa, Copenhagen, Sidney, dan Tokyo) terdiri dari badan-badan utama yaitu:

1. Kantor Direktur Eksekutif meliputi staf eksekutif, komite manajemen, kantor sekretaris badan eksekutif dan kantor pembukuan internal.
2. Kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi, penjualan kartu ucapan, dan kantor umum non pemerintah.
3. Kelompok program meliputi divisi perencanaan dan pengembangan, divisi program pelayanan laporan dan unit operasi darurat.
4. Kelompok operasi meliputi divisi pengawasan, divisi personal, divisi suplai dan manajemen serta pembiayaan.

c. Kelompok Hubungan Eksternal

Bertugas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF termasuk hubungan dengan pemerintah, NGOs, badan-badan PBB yang lain serta masyarakat umum. Kelompok hubungan eksternal juga memiliki kantor dana program yang memiliki wewenang serta tanggung jawab yaitu:

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan sekertaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan sampai kepada jaminan pembayaran

untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah (negara anggota), PBB dan badan lainnya.

2. Menjalankan hubungan erat dengan pemerintah (negara anggota), para pengamat, misi-misi permanen dan komisi-komisi di lapangan.

d. Kelompok Program

Kelompok Program bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan program-program UNICEF. Kelompok Program memiliki divisi program mengembangkan dan perencanaan yang memiliki tujuan:

1. Memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok profesional.
2. Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-program dengan cara memperluas serta meningkatkan bantuan teknik terhadap keseluruhan jaringan program-program UNICEF yang utama.
3. Meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi terhadap program-programnya.

e. Kantor Regional

Adapun tugas tetap dari Kantor Regional ini adalah:

1. Menjadi perantara dan sarana komunikasi antara kantor lapangan dengan kantor pusat.
2. Bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi kesemua wilayah yang mungkin untuk menerima pelayanan dan penerapan program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwkilan disetiap negara.

f. Kelompok Operasional

Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi finansial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain:

1. Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF.
2. Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan.
3. Memberikan dukungan staf organisasi dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan latihan-latihan bagi anggota.
5. Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, kelompok Kelompok Operasional membawahi divisi manajemen finansial, informasi, suplai, sumber daya manusia, manajemen dan administratif.

g. Staf UNICEF

Yang terakhir adalah staf anggota UNICEF yang berada ditiap negara anggota diseluruh dunia. UNICEF memiliki lebih dari 7000 staf yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia (Sumber:UNICEF,2009).

3.1.1.6 Mitra Kerja UNICEF

Dalam melaksanakan tugasnya, tentunya UNICEF tidaklah bekerja sendiri. UNICEF memiliki beberapa mitra kerja dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya adalah:

1.) Negara-negara Berkembang

Kerjasama UNICEF disusun bersama dengan pemerintah negara yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas program, baik secara langsung atau melalui organisasi yang digunakan. Dukungan yang relatif lebih besar diberikan kepada program-program yang menguntungkan bagi anak-anak dari negara-negara yang paling kurang berkembang. Saluran-saluran kerjasama mencakup serangkaian departemen sektoral. Koordinasi antar departemen dan pendekatan antar disiplin ilmu sungguh penting untuk keberhasilan kerjasama, karena pada tingkat masyarakat masalah yang akan ditanggapi sering merupakan gabungan dari sejumlah faktor yang mencakup kewenangan teknis dan beberapa departemen.

Upaya-upaya dalam suatu sektor biasa gagal tanpa usaha serupa oleh sektor lain.

2.) Komite-komite Nasional

Komite-komite nasional untuk UNICEF, yang sebagian besar dibentuk di negara-negara industri, memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu pengertian yang lebih mendalam tentang pekerjaan UNICEF. Komite-komite yang dewasa ini berjumlah 34, yang berkepentingan dengan peningkatan dukungan untuk UNICEF, dari segi keuangan, melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan dana dan penjualan kartu ucapan. Peningkatan dukungan ini juga dilakukan melakukan promotif, pendidikan dan informasi.

3.) Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

UNICEF selalu bekerjasama secara erat dengan sektor sukarela. Banyak dari lembaga swadaya masyarakat internasional, antara lain lembaga-lembaga professional, bantuan pembangunan, pelayanan, agama, pengusaha dan pekerja telah menjadi mitra-mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran-saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan dengan mengumpulkan dana secara langsung melibatkan diri dalam program. Hubungan pada tingkat global/dunia meningkatkan, dan pada

gilirannya dibantu oleh interaksi dalam bidang yang mengusahakan tujuan bersama.

4.) Badan-badan PBB

Penyusunan program UNICEF yang sifatnya antar-disiplin ilmu ini menghendaki kerjasama dalam sistem PBB, sama halnya seperti apa yang dihendaki dalam koordinasi antar departemen di suatu pemerintahan. Kerjasama yang dilakukan tersebut seperti pertukaran keahlian tingkat negara sampai pertukaran-pertukaran kebijaksanaan dan pengalaman yang sistematis. Pertukaran-pertukaran ini terjadi melalui mekanisme Komite Administrasi untuk Koordinasi (ACC), dan melalui konsultasi-konsultasi antar sekretariat secara berkala.

Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan secara teratur, misalnya dengan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pangan Sedunia (FAO), dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Badan-badan itu juga membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dalam Komite Konsultasi mengenai Program dan Kebijaksanaan untuk anak. UNICEF tidak meniru pelayanan-pelayanan yang tersedia dari badan-badan khusus PBB tersebut, tetapi memanfaatkan nasihat teknis yang mereka berikan (Rudy,2009: 140-142).

3.1.1.7 Sejarah UNICEF Masuk ke Cina

Pertama-tama akan dibahas sejarah atau awal mula UNICEF masuk ke Cina, kerjasama apa yang pernah dilakukan, dan upaya-upaya UNICEF melalui kampanye *Women and Children First*.

UNICEF dan China memiliki sejarah panjang kerja sama. Pada tahun 1947, Cina menjadi negara pertama di Asia yang menyambut kemitraan dengan UNICEF, dan program yang pertama kali difasilitasi oleh UNICEF adalah layanan bantuan darurat bagi anak-anak. Antara tahun 1948 dan 1951, pekerjaan UNICEF di Cina termasuk penyediaan makanan serta pelatihan untuk membangun kapasitas untuk perawatan kesehatan ibu dan anak, sanitasi dan aksi tanggap pertolongan pertama pada kecelakaan dan bencana alam. Program pelatihan ini kemudian berlanjut secara berkesinambungan dengan pengirimin relawan dokter dan tenaga kesehatan yang diterjunkan ke ke beberapa distrik (http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=25).

Selama tahun-tahun awal, UNICEF membantu anak-anak di daerah konflik. Dukungan ini merupakan implementasi dari ciri dan prinsip UNICEF yang respon terhadap kemanusiaan, non-partisan dengan bekerja berdasarkan landasan metodologi untuk masa depan.

Mulai sejak tahun 1979, UNICEF telah banyak menjalankan program dan menyumbang banyak perkembangan yang paling signifikan untuk anak-anak dan perempuan di Cina. Pada dekade awal 80-an UNICEF ikut mendukung Departemen Kesehatan Cina untuk mempercepat vaksinasi skala besar anak-anak di bawah umur

enam tahun. Sebab di daerah terpencil di Cina pada saat itu kekurangan banyak vaksin yang memerlukan pendinginan. UNICEF banyak membantu membangun jaringan pendinginan yang disebut "cold chain," yang mencakup hampir 90% dari populasi yang ada. Hal ini secara signifikan meningkatkan kualitas program imunisasi Cina yang cukup berhasil mencegah kematian anak akibat campak, polio, tuberkulosis, difteri (kelumpuhan), tetanus dan batuk rejan (pertusis).

Pada dekade itu pula UNICEF bekerja secara langsung dengan instansi pemerintah daerah yang mengurusi masalah kemiskinan di daerah pedesaan, termasuk di kalangan etnis minoritas. Proyek sanitasi dan penyediaan air bersih dimulai pada tahun 1987 di Yunnan, di mana angka kematian anak yang tinggi berkorelasi dengan kurangnya akses terhadap air bersih. UNICEF berkolaborasi dengan pemerintah Cina dalam menyediakan jalur-jalur pipa air, memasang tangki penampungan air hujan, dan membangun toilet. Dalam usaha ini, terhitung tingkat diare di kalangan anak-anak menurun dari 45% menjadi 4,5%.

Pada dekade 90-an, UNICEF bekerja sama dengan Departemen Kesehatan untuk mengurangi keadaan umum gangguan kekurangan yodium, yang meliputi gondok, serta gangguan fisik dan mental. UNICEF mendukung upaya untuk mempromosikan konsumsi garam beryodium agar mengurangi kekurangan. Menurut laporan UNICEF, saat ini telah lebih dari 90% rumah tangga di Cina mengkonsumsi garam beryodium, yang merupakan prestasi sebagai kunci tindak lanjut World Summit 1990 untuk anak-anak. UNICEF menjadi organisasi internasional pertama berkolaborasi dengan pemerintah Cina untuk penanganan dan pemograman HIV dan

AIDS. Aspek yang ditangani meliputi prevalensi HIV. perawatan, pencegahan, pendidikan masyarakat dan kesadaran di kalangan anak muda yang dimulai tahun 1996 dan terus hingga saat ini.

Pada dekade 2000-an UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Cina pada banyak proyek percontohan yang signifikan yang dirintis dengan baik dan sukses, misalnya bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan anak, HIV dan AIDS, air dan sanitasi, dan tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana. Pilot *project ini* telah direplikasi pada skala yang lebih luas dan mempengaruhi pengembangan program dan kebijakan nasional.

Beberapa contoh termasuk:

1. Paket proyek percontohan ibu-bayi, yang memberikan informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif sehingga memberikan kontribusi pada pengurangan dramatis dalam tingkat kematian ibu. *Friendly School*, proyek sekolah percontohan anak yang membuat sekolah yang lebih aman, lebih baik dikelola, lebih interaktif dan partisipatif bagi anak-anak buruh migran di Shijiazhuang, sehingga mendukung peningkatan akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan mereka.
2. Proyek rintisan pengembangan anak usia dini, yang memungkinkan anak-anak antara usia tiga dan enam untuk mengikuti program pra sekolah yang berkualitas berbasis masyarakat, yang menyediakan lingkungan belajar yang konstruktif dan merangsang.

3. Penyedian ruang yang ramah bagi anak-anak korban gema Wenchuan, yang setelah terjadinya gempa disediakan tempat yang aman bagi anak-anak untuk bermain dan belajar.
4. Kesejahteraan Demonstrasi Proyek Anak, yang berkontribusi terhadap pembentukan sistem kesejahteraan anak Cina untuk mendukung anak-anak rentan melalui layanan keluarga dan berbasis masyarakat dan sumber daya untuk anak-anak yang lain tidak akan mengakses bantuan.
5. Proyek demonstrasi bagi kesejahteraan anak, yang berkontribusi terhadap pembentukan sistem kesejahteraan anak di Cina untuk, mendukung anak-anak yang rentan melalui layanan keluarga berbasis masyarakat dan menyediakan sumber daya untuk anak-anak lain yang tidak dapat mengakses bantuan.

3.1.2 Cina

3.1.2.1 Gambaran Umum

Republik Rakyat Cina merupakan negara terbesar di Asia timur, dan sebagai negara ketiga terluas di dunia dengan populasi sekitar kurang lebih 1,3 miliar jiwa setelah Rusia dan Kanada. Militer di Cina juga dikenal kuat dan cukup untuk mencemaskan berbagi pihak di kawasan Asia. Cina berbatasan dengan 14 negara, antara lain: Afganistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan, dan Vietnam. Meskipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, namun pada kenyataanya ekonomi

republik ini telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Oleh karena itu, tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diterapkan negara ini, karena strukturnya tidak seperti yang ada pada negara-negara modern.

Jika dilihat dari sudut perekonomian dan tatanan kenegaraan, China telah melewati tiga fase panjang dalam sejarah perekonomian maupun kenegaraannya setelah bangsa ini berubah menjadi negara reformasi. Pertama berkisar pada tahun 1946-1976, merupakan era Mao Zedong. Negara Cina pada masa kepemerintahan Mao cenderung tetutup dari politik luar negeri maupun perekonomian luar negeri. Segala kebijakan yang berkenaan dengan politik, budaya, maupun pendidikan hanya diputuskan di pusat pemerintahan, yakni di Beijing dan dilandaskan pada ajaran Mao (Maoisme). Atas ketertutupan inilah maka Cina dijuluki sebagai "Negara Tirai Bambu".

Fase kedua yang berkisar pada tahun 1978-1988 merupakan fase kepemimpnan Deng Xioping. Pada masa kepemimpinannya negara Cina cenderung terbuka baik dalam perekonomian maupun dalam berpolitik di kancah domestik maupun internasional. Deng Xiaoping merupakan pemimpin yang sangat dikagumi rakyat dalam kepemimpinannya. Kepandaiannya dalam berpolitik dan berdiplomasi sangat hebat. Seorang negarawan Malaysia, DR. Mahathir Muhammad dalam mengatakan "Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu pria terhebat abad ke-20 adalah Deng Xiaoping, bapak dari empat modernisasi China. Petuah-petuahnya harus selalu ada di benak kita bila berbicara tentang isu-isu besar dunia, bahkan untuk selamanya".

Dari pernyataan DR. Mahathir telah digambarkan betapa besarnya sosok pemimpin Deng Xiaoping dimata kawan maupun lawan berpolitiknya. Pemimpin Cina yang satu ini juga memberikan andil yang besar atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh keputusan pemerintah pusat. Dalam perekonomian misalnya, Deng berani mengambil suatu kebijakan yang krusial, yakni sedikit melenceng dari rambu-rambu faham sosialis. Deng berkata dalam pidato kenegaraannya "Tidak penting seekor kucing itu berwarna hitam maupun putih, yang penting adalah seekor kucing bisa menangkap tikus".

Ucapan Deng tersebut ditujukan untuk menanggapi kritikan negara-negara sosialis yang tidak mengakui kepemilikan maupun kekayaan individu, meliputi negara-negara bekas Uni Soviet. Pada awalnya, Cina merupakan negara yang berfaham sosialis dalam tatanan perekonomian mereka, namun Deng memerintahkan orang-orang pemerintahan di bawahnya untuk mengambil beberapa kebijakan yang baik dan bisa mendatangkan keuntungan bagi negaranya, walaupun harus bertentangan dengan kebijakan kaum sosialis pada umumnya. Namun Cina masih mengklaim dirinya sebagai negara sosialis dan kebijakan perekonomian yang diambil juga mayoritas mencerminkan kesosialismenya (http://www.scribd.com/doc/91088314/Makalah-Kependudukan).

Selain kebijakan di bidang perekonomian, Deng juga mengambil kebijakan di dalam menanggulangi masalah *over-population*. Deng menerapkan kebijakan satu anak bagi setiap keluarga di Cina. Kebijakan yang kemudian dijadikan sebagai peraturan negara, diambil atas dasar kekhawatiran pemerintahan terhadap

meledaknya jumlah penduduk di Cina. Akan tetapi kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Peraturan satu anak hanya berjalan di pusat-pusat perkotaan, sementara di desa dan daerah-daerh pelosok masih belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Mengingat pada waktu itu pedesaaan cenderung membutuhkan anak laki-laki untuk menggarap tanah yang warga miliki.

Kepemerintahan Deng juga membuat revolusi dibidang pendidikan. Pada awal mula dia memerintah Republik Rakyat Cina, Deng sangat memperhatikan pendidikan di negaranya. Deng berkata dalam pidato di depan masyarakat Cina (1978) : "Bila Cina ingin memodernisasi perindustrian, pertanian, dan pertahanan, maka yang harus dimodernisasikan dulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif".

Fase ketiga adalah masa-masa generasi penerus, pada tahun 1992-2003 Cina diperintah oleh Jiang Zemin/ Zhu Rongji dan diteruskan lagi oleh duet Hu Jianto/ Wen Jiabo sejak tahun 2003 sampai sekarang. Hu/ Wen tetap menjalankan landasan-landasan dan juga cita-cita yang dirintis oleh Deng Xioping. Kebijakan-kebijakan yang diambil Hu/Wen mencerminkan betapa Deng sangat hidup di hati masyarakat Cina. Hu/Wen juga bisa menghantarkan Cina hingga saat ini (http://www.scribd.com/ doc/91088314/Makalah-Kependudukan).

Keberhasilan Cina dalam perekonomian sudah terbukti kredibilitasnya. Terbukti sejak tahun 1980 hingga saat ini Cina masih terus tumbuh dengan rata-rata angka pertumbuhan perekonomian yang hampir mencapai dua digit setiap tahunnya. Perindustrian Cina telah melakukan terobosan-terobosan baru dalam memasuki pasar

perindustrian. Semua ini didukung oleh sumber daya manusia yang tinggi juga aliran dana yang masuk dari kalangan investor baik investor domestik maupun luar negeri.

Besarnya FDI (*Foreign Direct Investment*) yang masuk ke negeri Cina menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya perindustrian Cina yang modern. Dengan kuatnya modal yang dimliki Cina, maka perindustrian akan terbantu karena ada dana yang cukup besar untuk menggerakan sector produksi Cina yang tentunya akan meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) sehingga mampu meningkatkan perekonomian.

Cina sangat pintar dalam menarik investor asing untuk berinvestasi, tercatat pada awal Maret 2009 Cina mendapatkan kurang dari 100 juta dolar FDI yang berpengaruh 3,4% dari total keseluruhan PDB. Mayoritas dari FDI ini datang dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkog, maupun investor yang notebene adalah penduduk keturunan China yang tinggal di belahan dunia. Loyalitas para keturunan Cina terhadap negara asal nenek moyangnya memang tidak diragukan lagi. Sebanyak 68,3% dari FDI berasal dari Hongkong, 9,3% berasal dari Taiwan dan sisanya dari investor negara lain yang juga mayoritas merupakan keturunan penduduk China yang berhasil di negara-negara lain.

Di sinilah sebenarnya kekuatan Cina, selain kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam urusan birokrasi yang sangat mudah, terutama dalam urusan penarikan dana bantuan dari luar negeri, solidaritas dari penduduk keturunan Cina yang tinggal di negara lain memiliki pengaruh yang signifikan dalam menggapai cita-cita pemimpin maupun rakyat Cina, yaitu mencapai kemakmuran perekonomian

dan menjadi macan Asia bersama Korea dan Jepang yang telah mendahului mereka sebelumnya (http://www.insteps.or.id/File/ Ekonomi%20Chin %20dan%20India.pdf).

Periode setelah 1976, terutama setelah Mao meninggal dan naiknya Deng Xiao Ping, merupakan tonggak sejarah penting dalam perkembangan politik di Cina. Ketika Mao masih hidup, tidak ada pemisahan yang jelas antara pemerintah dengan partai. Hal ini dikarenakan partai komunis adalah penguasa tunggal di daratan Cina, dan hal tersebut secara khusus tertera dalam konstitusi china. Atas dasar konsep itu pada tiap tingkatan pemerintahan selalu dihadiri perwakilan partai, dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan untung ruginya bagi partai yang selalu melatar belakangi setiap keputusan pemerintah. Pada tahun 1971 Cina masuk anggota PBB dengan dukungan AS, dan langsung menjadi anggota dewan keamanan PBB menggeser Cina non komunis, karena dunia internasional terutama Amerika Serikat hanya mengakui satu Cina. Obsesi cina untuk menjadi negara adikuasa tampaknya terus meningkat dan hal tersebut dibuktikan sekarang ini (http://www.scribd.com/doc/ 91088314/Makalah-Kependudukan).

Cina telah menjadi negara berpenduduk terbanyak di dunia selama berabad-abad. Ketika Cina menjalankan sensus pertamanya sejak pasca-1949, yaitu pada 1953, populasi Cina terhitung 582 juta jiwa; sedangkan pada sensus ke-5 pada tahun 2000, populasi Cina berlipat dua, kurang lebih 1,2 miliar jiwa. Pada dasawarsa 1920-an dan 1930-an, bangsa Cina tertarik pada program-program sosial melalui kendali reproduksi, termasuk di antaranya pengintensifan eugenika (Sumber:http://id.wiki pedia.org/wiki/Demografi_Republik_Rakyat_ Cina).

Tabel 3.1 Demografi Cina

Demographic Indicators	*Percentage*
Population (thousands), 2010, under 18	322163
Population (thousands), 2010, under 5	81596
Population annual growth rate (%), 1970-1990	1.7
Population annual growth rate (%), 1990-2010	0.8
Population annual growth rate (%), 2010-2030	0.2
Crude death rate, 1970	9
Crude death rate, 1990	7
Crude death rate, 2010	7
Crude birth rate, 1970	36
Crude birth rate, 1990	21
Crude birth rate, 2010	12
Life expectancy at birth, 1970	63
Life expectancy at birth, 1990	69
Life expectancy at birth, 2010	73
Total fertility rate, 2010	1.6
% of population urbanized, 2010	47
Average annual growth rate of urban population (%), 1970-1990	3.8
Average annual growth rate of urban population (%), 1990-2010	3.7
Average annual growth rate of urban population (%), 2010-2030	1.6

Sumber: UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/china_statistics.html diakses pada 27/04/13)

Populasi Cina yang berkembang cepat adalah persoalan kebijakan primer para pemimpin Cina pada pertengahan abad ke-20, sehingga pada permulaan dasawarsa

1970-an, pemerintah menerapkan kebijakan satu anak (diberlakukan sejak tahun 1979). Di bawah kebijakan ini, dengan perbedaan panduan terhadap suku-suku minoritas, pasangan yang menikah secara resmi hanya diizinkan memiliki satu anak. Hasil dari kebijakan ini, Cina berhasil mencapai tujuannya, yakni tingkat kesuburan yang menurun dan relatif stabil; pada tahun 1971 perempuan Cina rata-rata memiliki 5,4 anak; sedangkan pada tahun 2004 hanya 1,7 anak (http://id.wikipedia.org/wiki /Demografi_Republik_Rakyat_Cina). Bagaimanapun, penguatan program berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, bergantung pada kinerja petugas pengendali populasi di lapangan.

Pada tahun 1982 Cina menjalankan sensus penduduk. Sensus 1982 mengonfirmasi bahwa Cina adalah negara yang berpenduduk lebih dari 1 miliar, atau kira-kira seperlima penduduk dunia. Sensus ini memberi para demografer sehimpunan data struktur usia-kelamin, tingkat kesuburan dan kematian, dan kepadatan dan persebaran penduduk di Cina. Informasi juga digali dari kelompok-kelompok suku minoritas, penduduk perkotaan, dan status pernikahan. Kali pertama sejak Republik Rakyat Cina didirikan, para demografer memperoleh informasi yang andal berdasarkan ukuran dan komposisi tenaga kerja Cina. Negara Cina mulai mempersiapkan sensus 1982 sejak penghujung tahun 1976. Para petugas sensus Cina dikirim ke Amerika Serikat dan Jepang untuk mempelajari teknik-teknik dan automasi sensus modern. Ada banyak komputer yang dipasang di tiap-tiap provinsi (atau daerah yang setingkat), kecuali Xizang, dan dihubungkan ke sistem pengolahan pusat di Biro Statistika Nasional Cina, Beijing. Prauji dan uji coba berskala kecil

telah dijalankan dan diperiksa untuk mencapai keakuratan antara tahun 1980 dan 1981 di 24 satuan wilayah setingkat provinsi. Pusat-pusat sensus dibuka di berbagai brigade produksi perkampungan dan lingkungan perkotaan. Mulai pada 1 Juli 1982, tiap-tiap kepala rumah tangga mengirimkan perwakilannya ke pusat sensus untuk dicacah. Sensus ini memerlukan waktu selama sebulan dan mempekerjakan kira-kira 5 juta petugas sensus (http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Republik_Rakyat _Cina).

Dokumen penting tonggak sejarah Pemerintah Cina menyusun Program aksi *family planning* adalah memaksimalkan hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, tahun 1994 sebagai suatu kekuatan mempengaruhi pengambil keputusan untuk melakukan perubahan yang fundamental, merubah filosofi kependudukan dan keluarga dengan tiga alasan utama, yaitu (1) alasan demografis, bahwa pertumbuhan penduduk mengurangi tingkat kesuburan dan memperlambat pembangunan Negara (2) alasan kesehatan, yang berfokus padakesehatan ibu dan anak (3) hak asasi manusia bahwa individu dan pasangan memiliki hak untuk memutuskan reproduksi, termasuk jumlah dan waktu kelahiran dan disusunlah strategi program keluarga berencana dengan :

1.) Menetapkan prinsip- prinsip “penduduk adalah faktor utama dalam pembangunan atau di Indonesia disebut pembangunan manusia seutuhnya, dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dan kontrol kualitas tanpa mengedepankan kuantitas. Aspek sosial-ekonomi bergeser dari tradisional ke modern seperti pernikahan dini dan kelahiran awal, ke

pendewasaan perkawinan dan penundaan kelahiran, nilai anak laki-laki dan perempuan dibuang jauh dan pertolongan persalinan diprioritaskan sebagai dasar membentuk keluarga kecil bahagia, keluarga harmonis.

2.) Hak asasi manusia dimaknai dengan mempromosikan keluarga berencana, dan memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-hak dasar 10 klien, yaitu hak atasinformasi, hak untuk memiliki akses ke layanan, hak untuk memilih, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak untuk kerahasiaan, hak untuk martabat, hak untuk kenyamanan, hak untuk terus menggunakan jasa dan hak untuk mengekspresikan.

3.) Mempromosikan Kualitas kesehatan reproduksi. "Kualitas kesehatan reproduksi" dikembangkan diseluruh kabupaten dan kecamatan sampai ke desa karena telah dijadikan pusat kegiatan program KB karena langsung pada kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan reproduksi. Kekuatan kunci adalah penyediaan layanan teknis dan merupakan inovasi petugas keluarga berencana Cina untuk menuju situasi baru.

4.) Menetapkan Mekanisme kerja yang komprehensif dan memperkuat reformasi mekanisme operasional ini dilakukan dengan cara : Menetapkan payung hukum yang menjadi landasan semua kebijakan operasional yakni " satu anak dalam keluarga ".

5.) Menjaga kualitas pelayanan, kebijakan-driven solusi dan terpadu dalam rangka untuk memperdalam reformasi yang telah mencapai keberhasilan awal. Kelompok masyarakat diberikan keleluasaan untuk ikut ambil

bagian dalam penyelenggaraan kegiatan KB karena urusan keluarga berencana harus transparan. Asosiasi keluarga berencana dan LSM lainnya pada tingkat akar rumput diberikan peran penuh untuk menerapkan aturan hukum dan pembelaan hak-hak hukum dan kepentingan masyarakat. karena program keluarga berencana memfasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

6.) Melakukan kajian strategis dan meningkatkan sistem jaminan sosial yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina telah berupaya untuk menggabungkan pelaksanaan Program Aksi ICPD dengan Tujuan Pembangunan Milenium PBB, mencoba untuk membuka visi baru bagi penduduk sebagai potensi pembangunan melalui reformasi dan inovasi. Dengan pemusatan pada tiga matra: Kekuatan pembangunan berpusat pada manusia, pengembangan potensi penduduk, penguatan koordinasi dan berkelanjutan, tren populasi penduduk hubungannya dengan ekonomi, penduduk dengan sumber daya dan lingkungan; Melalui program *pilot project* ”pelatihan langsung pada keluarga, promosi program peningkatan pendapatan” dengan slogan kelahiran lebih sedikit, kemakmuran lebih cepat.

7.) Mengembangkan kebijakan publik dan model layanan yang melibatkan pemerintah, LSM dan organisasi swasta. Organisasi non-pemerintah yang

memainkan peran penting dalam kependudukan dan keluarga berencana (Widyaiswara BKKBN, 2012).

3.1.2.2 Tipologi Kependudukan Cina

Secara resmi Republik Rakyat Cina memandang dirinya sendiri sebagai bangsa multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93% populasi Cina. Penduduk bangsa Han sendiri heterogen, dan bisa dianggap sebagai kumpulan berbagai etnik yang memeluk budaya dan bercakap bahasa yang sama. Kebanyakan suku Han bertutur macam-macam bahasa Cina yang diucapkan, yang bisa dilihat sebagai 1 bahasa atau keluarga bahasa. Subdivisi terbesar bahasa Cina yang diucapkan ialah bahasa Mandarin, dengan lebih banyak pembicara daripada bahasa lainnya di dunia. Versi standar Mandarin yang didasarkan pada dialek Beijing, dikenal sebagai Putonghua, diajarkan di sekolah dan digunakan sebagai bahasa resmi di seluruh negara.

Revolusi Komunis di negara ini sejak tahun 1949 meninggalkan kesan yang besar yaitu hampir 59% penduduknya (lebih kurang 767 juta orang) menjadi Ateis atau tidak percaya Tuhan. Namun lebih kurang 33% dari mereka percaya kepada kepercayaan tradisi atau gabungan kepercayaan Buddha dan Taoisme. Penganut agama terbesar di negara ini ialah Buddha Mahayana yang berjumlah 100 juta orang. Di samping itu, Buddha Therawada dan Buddha Tibet juga diamalkan oleh golongan minoritas etnis di perbatasan barat laut negara ini. Selain itu diperkirakan terdapat 18

juta penduduk Islam (kebanyakan Sunni) dan 14 juta Kristen (4 juta Katolik dan 10 juta Protestan) di negara ini (www.sant.ox.ac.uk/asian/ChinaWelfareStateII.pdf)

Negara ini telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Dalam usaha membatasi perkembangan populasinya, RRC telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas seperti Tibet dikecualikan) menjadi 1(satu) anak dan keluarga di pedalaman 2 anak saat yang pertama wanita. Karena lelaki dianggap lebih bernilai ekonomis di daerah pedesaan, muncullah insiden tinggi mengenai aborsi selektif jenis kelamin dan penolakan anak di daerah pedesaan buat memastikan bahwa anak kedua ialah lelaki. Dasar ini hanyalah untuk penduduk mayoritas bangsa Han. Terdapat banyak rumah anak yatim untuk anak-anak terlantar, akan tetapi hanya 2% saja yang dijadikan anak angkat oleh orang lain, selebihnya pula besar di rumah anak yatim itu. RRC telah mengintitusikan program pengambilan anak angkat internasional, di mana penduduk negara lain datang untuk mengangkat mereka, tetapi program ini menampakkan hasil yang tidak memuaskan.

Perbandingan jenis kelamin yahun 2000 pada umur lahir adalah 117 lelaki : 100 perempuan. Ini adalah kenaikan yang tinggi dari perbandingan sebelumnya (106:100). Perbandingan ini dikatakan terjadi karena kebijakan yang berbau seksisme atau bias terhadap perempuan. Pemerintah RRC sedang mencoba mengurangi masalah ini dengan menekankan harkat para wanita dan telah melangkah dengan mencegah penyedia medis untuk memperlihatkan pada para orang tua jenis kelamin bayi yang diharapkan. Hasil perbandingan yang tidak seimbang ini mewujudkan 30-40 juta lelaki yang tidak bisa menikah dengan wanita. Banyak dari lelaki ini yang

mencari gadis idaman mereka di negara lain atau di pusat-pusat pelacuran. Dalam beberapa kasus, gadis-gadis diculik dan dijual sebagai isteri di perkampungan yang jauh (www.sant.ox.ac.uk/asian/ChinaWelfareStateII.pdf).

3.1.2.3 Kebijakan Satu Anak (*One Child Policy*) di Cina

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, Cina berhasil menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Bahkan, dipercaya akan memimpin kekuatan perekonomian dunia bersama Korea dan Jepang menggusur dominasi Amerika serikat sebagai negara super power saat ini. Sukses negara berjuluk 'Tirai Bambu' ini tidak lepas dari banyaknya penduduk yang dimiliki ditambah lagi dengan keturunan penduduk Cina yang tersebar di seluruh negara-negara belahan dunia.

Negara ini telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Dalam usaha membatasi perkembangan populasinya, RRC telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas seperti Tibet dikecualikan) menjadi satu anak dan keluarga di pedalaman dua anak saat yang pertama wanita. Karena lelaki dianggap lebih bernilai ekonomis di daerah pedesaan, muncullah insiden tinggi mengenai aborsi selektif jenis kelamin dan penolakan anak di daerah pedesaan buat memastikan bahwa anak kedua ialah lelaki. Dasar ini hanyalah untuk penduduk mayoritas bangsa Han. Terdapat banyak rumah anak yatim untuk anak-anak terlantar, akan tetapi hanya 2% saja yang dijadikan anak angkat oleh orang lain, selebihnya pula besar di rumah anak yatim itu. RRC telah mengintitusikan program pengambilan

anak angkat internasional, di mana penduduk negara lain datang untuk mengangkat mereka, tetapi program ini menampakkan hasil yang tidak memuaskan (http://indo nesian.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140101.htm)

Jika diperbandingkan dengan Indonesia, rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 1980-1990 mencapai angka 1,98 % dan pada periode 1990-2000 mencapai 1,49 %. Angka ini menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara dengan kepadatan penduduk yang relative besar. Pada tahun 2000 saja Indonesia sudah memiliki penduduk sebesar 206 juta jiwa. Namun, dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebut, perekonomian Indonesia masih tergolong lambat pertumbuhannya. Dengan artian negara ini masih dalam lembah kemiskinan atau belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Fenomena diatas berbeda dengan Cina yang juga berkependudukan tinggi. Namun, tidak bernasib sama seperti Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Cina relatif besar, terbukti tahun antara tahun 1980 sampai 2005, perekonomian Cina tumbuh hingga angka 10% dan pada tahun 2009 mencapai 8,9%. Angka ini merupakan angka yang lebih besar dari prediksi para ahli ekonomi negara tersebut. Perkembangan perekonomian Cina terus membaik semenjak periode 1980-an. Namun terdapat permasalahan yang makin lama makin muncul terkait pertumbuhan penduduk yang pesat ini dengan ketersedian sumber daya alam di masa depan. Dalam arti ledakan penduduk ini dipandang sebagai bom waktu yang dapat meledak kapan saja dengan akibat yang jauh lebih besar.

Kependudukan merupakan masalah yang selalu mengalami dinamika. Setiap negara mempunyai permasalahan tersendiri terkait kependudukan. Permasalahan yang banyak dialami beberapa negara di dunia adalah masalah overpopulasi atau kepadatan penduduk. Populasi penduduk dunia telah mencapai 7 miliar jiwa pada tahun 2011. Cina masih berada pada posisi puncak sebagai negara berpenduduk terbanyak didunia (1,3miliar), disusul India (1,2 miliar jiwa), USA (0,3 miliar) dan Indonesia (0,2 miliar).Populasi tersebut akan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 10,1 miliar jiwa pada tahun 2100. Peningkatan jumlah penduduk diperkirakan berasal 39 negara diAfrika, sembilan di Asia, enam di Oceania dan empat di Amerika Latin. Pada 2100, populasi India sebanyak sebanyak 1,6 miliar diperkirakan akan melampaui Cina (http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Republik _Rakyat_Cina).

Pemerintah Cina telah menggunakan beberapa metode untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1979, Cina memulai "kebijakan satu anak per keluarga". Kebijakan ini diatur dalam undang-undang kependudukan Cina. Kebijakan ini menyatakan bahwa warga negara harus mendapatkan akte kelahiran sebelum kelahiran anak mereka. Warga akan ditawarkan manfaat khusus jika mereka sepakat untuk hanya memiliki satu anak. Warga negara yang memang memiliki lebih dari satu anak akan dikenakan pajak sampai 50% dari pendapatan mereka, atau dihukum kehilangan pekerjaan atau manfaat lainnya. Selain itu, kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan tanpa otorisasi yang tepat akan perlu dihentikan. Pada tahun 1980, sistem kuota kelahiran didirikan untuk memantau pertumbuhan

penduduk. Di bawah sistem ini, pemerintah menetapkan tujuan target untuk setiap wilayah. Pejabat lokal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa populasi total pertumbuhan tidak melebihi target sasaran. Jika target sasaran tidak dipenuhi, para pejabat lokal dihukum oleh hukum atau oleh hilangnya hak istimewa.

Ada beberapa pokok poin yang dapat dikemukakan misalnya:

Metode pengendalian populasi. Metode lain yang telah digunakan oleh pemerintah Cina untuk membatasi meningkatnya total populasi, termasuk program pengendalian kelahiran dan perubahan ekonomi. Pada era '80-an, tujuan sterilisasi telah ditetapkan dan diwajibkan bagi orang yang memiliki dua anak. Pada puncaknya pada tahun 1983, tercatat legasi tubal, vasectomi dan aborsi meningkat hingga sebesar 35% dari total kelahiran. Selain itu, perekonomian utama berubah dari pertanian ke industri. Pemerintah menggunakan ini sebagai keuntungan dalam menyebarkan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghambat pertumbuhan populasi (http://www.scribd.com/doc/91088314/Makalah-Kependudukan).

Masalah yang terkait dengan kebijakan kependudukan. Ada banyak masalah yang terkait dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pejabat Cina. Pertama, program ini sulit untuk diterapkan dan hanya menghadirkan sedikit kesuksesan. Pejabat lokal yang bertanggung jawab atas total pertumbuhan telah memalsukan laporan untuk menghindari hukuman. Akibatnya, tidak adanya laporan jumlah kelahiran sebanyak 27% pada tahun 1992. Selain itu, sesuai dengan sistem kuota kelahiran masih rendah. Dari 14.808 bayi lahir antara 1980-1988, hanya sekitar setengah yang memiliki izin kelahiran sesuai hukum. Mereka yang lahir dengan legal,

88% adalah anak pertama yang kemudian diizinkan lahir. Selanjutnya, jika anak kedua lahir, hanya 11% yang diizinkan. Terakhir, orang-orang dari masyarakat pedesaan, yang ingin memiliki keluarga yang lebih besar untuk membantu peternakan keluarga, tidak bisa mentaati sistem kuota kelahiran.

Konsekuensi sosial dan politik. Pemerintah Cina juga harus berurusan dengan pergolakan politik dan sosial sebagai akibat dari kebijakan yang ketat. Amerika Serikat, serta banyak negara lain, secara terbuka telah menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan para pemimpin Cina untuk kebijakan sterilisasi mereka. Selain itu, warga Cina telah membalas dengan aksi kekerasan terkait dengan kebijakan satu anak. Akhirnya, preferensi budaya untuk anak-anak telah menyebabkan sejumlah besar insiden pembunuhan bayi perempuan. Akibatnya, pemerintah Cina telah mengambil kebijakan "*daughter only household*" yang memungkinkan pasangan pedesaan yang awalnya memiliki anak perempuan pertama diizinkan untuk memiliki anak kedua.

Sosial dan ekonomi. Selama lima puluh tahun terakhir, Cina telah meningkatkan standar hidup dengan tetap menurunkan tingkat pertumbuhan. Akses ke sumber daya alam telah meningkat secara drastis sejak tahun 1980. Menurut *State Family Planning Commission* (SFPC), cakupan air ledeng telah meningkat dari 84% persen menjadi 94% dalam lima belas tahun terakhir. Selain itu, cakupan gas alam telah meningkat dari 16% menjadi 73%. Selain itu, cakupan medis telah diperluas untuk mencakup kelahiran dan asuransi kompensasi pekerja bagi para ibu yang mengikuti kebijakan kelahiran di Cina. Pada tahun 1998, 19% penduduk Cina

menggunakan kebijakan ini. Manfaat lainnya adalah peningkatan harapan hidup rata-rata dari 35 tahun pada tahun 1949 menjadi 70 tahun pada tahun 1996, dan menurunkan angka kematian bayi dari 200:1000 menjadi 33:1000 (http://www.scribd.com/doc/91088314/Makalah-Kependudukan)

Jangka Panjang. Reformasi serius adalah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penduduk Cina tidak akan terus tumbuh. Kebijakan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan urbanisasi dapat membantu Cina untuk mencapai target populasi. Sejak tahun 1980, Cina telah menyadari pentingnya kolaborasi antar lembaga dan itulah yang membuat SFPC (*State Family Planning Commissions*) terbentuk. Lembaga ini, bersama dengan yang lain bertugas mengumpulkan informasi tentang total populasi dan membantu pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Proyeksi pertumbuhan penduduk Cina diperkirakan sekitar 1,5 miliar pada tahun 2025. Angka ini akan terus meningkat, dan beban sosial dan ekonomi akan terus mewabahi semua orang yang di Cina (http://www.scribd.com/doc/91088314/Makalah-Kependudukan).

Munculnya kebijakan memiliki satu anak oleh pemerintah Cina tidak lain adalah merupakan dampak dari diterapkannya sistem kapitalisme global yang juga diadopsi Cina. Sejak diluncurkannya konvensi internasional dalam rancangan proyek besar MDG's, negara-negara berkembang 'dipaksa' untuk melaju menuju peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia sebagai syarat untuk menjadi negara maju melalui program-program yang dicanangkan, salah satunya adalah program keluarga berencana.

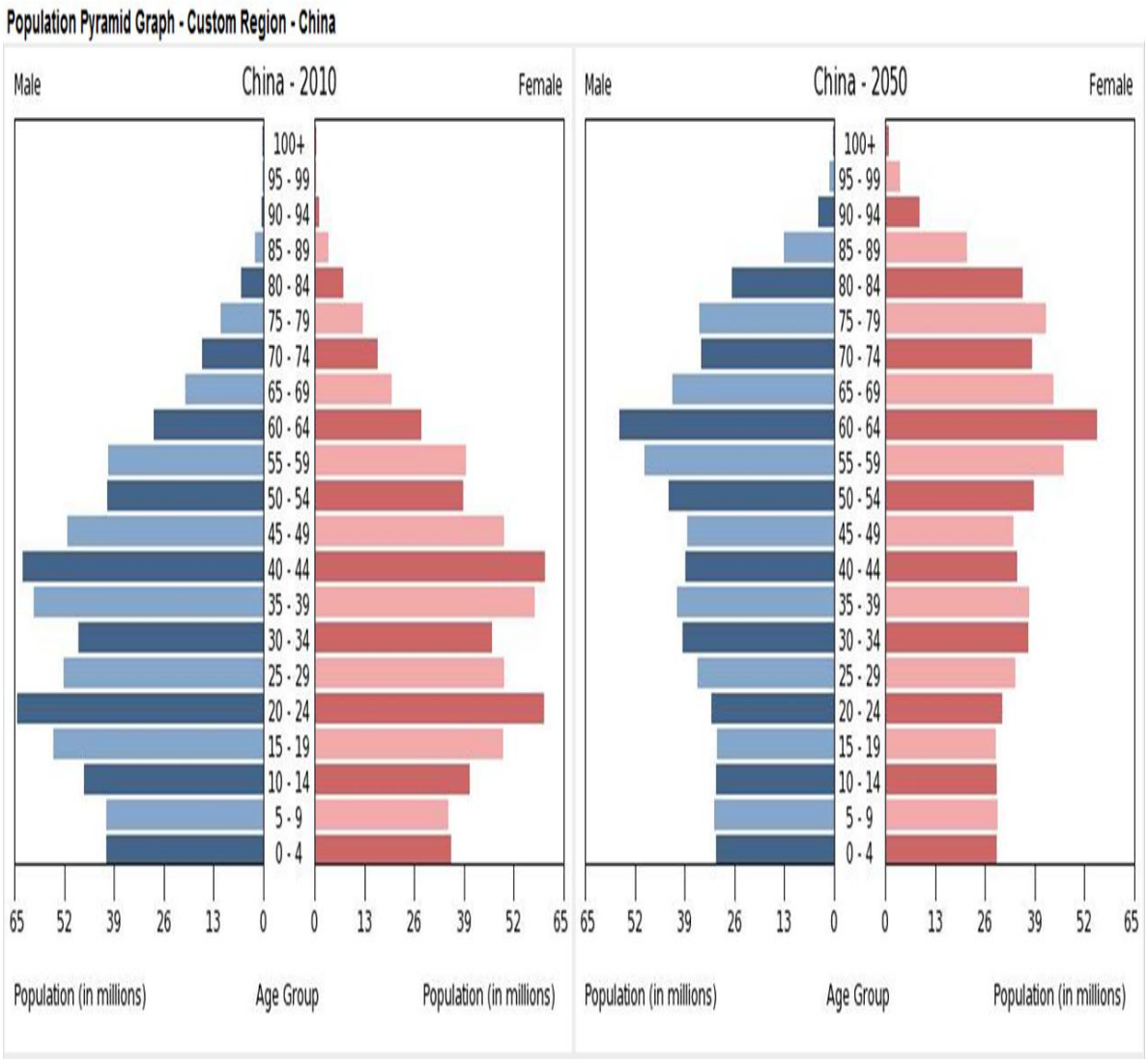
Melalui badan-badan kesehatan nasional, program keluarga berencana dicoba untuk diterapkan kepada masyarakat seperti program pembatasan kelahiran dengan hanya memiliki satu anak seperti di Cina, atau ‘2 anak lebih baik’ seperti di Indonesia. Bahkan yang paling mutakhir belakangan ini adalah adanya program kontrasepsi mantap, yaitu dorongan kepada masyarakat untuk mau melakukan vasektomi atau tubektomi pada usia produktif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk

Dalam rangka untuk mengatasi kelebihan penduduk, kebijakan satu-anak diperkenalkan untuk mempromosikan satu anak keluarga dan melarang pasangan dari memiliki lebih dari satu anak di daerah perkotaan. Orang tua dengan anak tidak diberikan beberapa manfaat yang sama sebagai orang tua dari seorang anak. Dalam kebanyakan kasus, keluarga kaya membayar biaya kepada pemerintah dalam rangka untuk memiliki anak kedua atau anak-anak lebih. Pengaplikasian kebijakan satu anak di Cina ini sangat merugikan kaum perempuan dan anak anak. Oleh sebab itu, kebijakan ini membangkitkan beragam keprihatinan warga Cina terhadap absennya perlakuan hak azasi manusia dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Setiap kebijakan akan menimbulkan konsekuensi bagi orang-orang atau negara yang melakukan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, konsekuensi langsung yang dirasakan oleh rakyat Cina sebagai dampak diberlakukannya kebijakan satu anak, yaitu maraknya praktek aborsi paksa, *infanticide* (pemusnahan janin berjenis kelamin perempuan), kelahiran bayi secara illegal dan adanya tindak pengabaian dari orang tua.

Selama periode kepemimpinan Mao Zedong di Republik Rakyat Cina, tingkat kelahiran sementara kasar turun 37-20/1000, kematian bayi menurun dari 227/1000 kelahiran pada tahun 1949 untuk 53/1000 pada tahun 1981, dan harapan hidup secara dramatis meningkat dari sekitar 35 tahun pada tahun 1949 sampai 65 tahun pada tahun 1976 (Bergaglio, 2000:2). Sampai tahun 1960-an, pemerintah mendorong keluarga untuk memiliki anak sebanyak mungkin karena kepercayaan Mao bahwa pertumbuhan penduduk akan diberdayakan negara, lalu mencegah munculnya program keluarga berencana di awal pembangunan Cina. Populasi tumbuh dari sekitar 540 juta 1949 sampai 940 juta jiwa pada tahun 1976 (Coale, 2011:67). Mulai tahun 1970, warga negara didorong untuk menikah dan hanya memiliki dua anak. Meskipun tingkat kesuburan mulai menurun secara signifikan, pertumbuhan penduduk di masa depan terbukti luar biasa dan kebijakan satu anak diumumkan oleh para pemimpin Cina. Kebijakan satu anak telah direncanakan sejak 1977, meskipun tidak dilegalkan secara nasional sampai 1979 (Coale, 2011:85-97).

Sebelum tahun 1950, Cina memiliki karakteristik demografi (kependudukan) masyarakat pra modernnya yang identik dengan angka kematiannya tinggi sekaligus tingkat kesuburan warga Cina yang cenderung tinggi pula.

Gambar 3.1
Piramida Populasi di Cina



(Sumber: http://populationpyramid.net/China/2010/)

Gambar 3.2 menunjukan presentasi jumlah penduduk di Cina menurut tingkatan usia. Dari gambar tersebut pada tahun 2010, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk

pada tataran usia cukup bervariasi, dimana beberapa tingkatan usia tertentu presentasinya besar dan tingakatan usia tua yang mengalami penurunan. Secara umum bisa diramkumkan bahwa tingkatan usia dari 20 – 40 tahun lebih besar dari tingkat usia lain. Artinya rentang usia angkatan tersebut merupakan angkatan usia produktif untuk berkerja. Ini disebut bonus demografi dalam kajian kependudukan, di mana sebuah negara akan sangat beruntung jika memiliki angkatan usia produktif.

Sedangkan pada gambar yang menunjukan tahun 2050, terlihat analisa survey terlihat bahwa perbandingan tingkat usia yang cukup terkontrol. Hasil ini tentu saja disebabkan oleh kebijakan satu anak yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Dalam arti pengendalian penduduk tersebut mulai berhasil dengan data perbandingan angkatan usia tersebut.

Pada akhir 1960-an, angka kelahiran bayi di Cina mengalami peningkatan karena hampir segala kebutuhan yang diperlukan oleh rakyat dapat dipenuhi dan secara ekonomi pun Cina pada masa itu tergolong negara yang dapat bangkit dari keterpurukan. Sehingga meningkatkan angka kelahiran bayi di Cina dan otomatis berdampak pada jumlah populasi di Cina. Mao mendorong rakyat Cina untuk memiliki keluarga besar dengan harapan semakin banyaknya jumlah penduduk di Cina, akan semakin kuat pula tenaga militer yang dapat menunjukkan *power* Cina di mata dunia internasional.

Di provinsi Guangdong, pada dekade 60-an para pejabat Cina memerintahkan para warga di Cina membatasi pertumbuhan penduduk di Cina sebesar 1% per tahun. Pada tahun tersebut, para perempuan di Cina dilarang untuk memiliki anak lebih dari

dua. Pada mulanya, kebijakan ini dinamakan *"Two Children China's Policy"* dimana kebijakan ini masih memperbolehkan sebuah keluarga untuk memiliki anak kedua (Li, 1996:147-148). Hal ini dikarenakan populasi penduduk di Cina masih berada pada tahap kewajaran.

Setelah beberapa tahun kemudian, kebijakan ini mengakibatkan populasi penduduk Cina meledak dan membuat pemerintah Cina cukup kewalahan. Pemerintah Cina mulai membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Hal tersebut mengakibatkan seluruh masyarakat Cina mau tidak mau harus berurusan dengan tekanan konflik antara meledaknya populasi dan bagaimana cara untuk memulihkan keadaan perekonomian di Cina yang memang pada saat ini sedang menurun drastis (Hall, 2000:11). Kondisi itu yang menyebabkan pemerintah mengambil tindakan untuk memberlakukan *One Child China Policy"* untuk mengurangi angka kelahiran bayi pada masa itu.

Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari Kebijakan Satu-Anak, pejabat pemerintah yang melaksanakan kebijakan pengendalian kelahiran yang dihargai. Meskipun terdapat sedikit relaksasi penegakan pada tahun 1984 dengan pengecualian yang bervariasi secara dramatis dari satu provinsi ke provinsi. Sejak program satu anak dimulai pada 25 September 1979 terjadi banyak pelanggaran, mulai dari sterilisasi massal hingga aborsi. Misalnya, aborsi bahkan sering dilakukan hingga usia kehamilan delapan bulan. Jutaan bayi perempuan diabaikan, dibuang, bahkan dibunuh di seantero kota dan perkampungan di Cina.

Saat ini ada tiga tingkatan yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan satu anak di Cina. Pertama, pemerintah setempat dan pemimpin di provinsi mempunyai otoritas serta tanggung jawab untuk melakukan kebijakan satu arah di sebuah distrik provinsi, kota, daerah dan lingkungan pekerjaan sekalipun. Biasanya hal yang terjadi adalah gurbernur di daerah tersebut harus menandatangani kontrak penuh dengan pemerintah setempat yang berisikan jaminan atas dampak dari kebijakan tersebut. Tahap yang kedua, pemerintah provinsi akan mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada pemerintah pusat dan tahap yang terakhir ialah pemerintah pusat itulah yang akhirnya mengeksekusi kebijakan satu anak di sebuah daerah di Cina (Hom, 1992:26).

Kebijakan ini dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan seberapa luas cakupan dari kebijakan satu anak ini. Kebijakan ini terdiri dari cakupan nasional dan cakupan lokal. Apabila dikatakan sebagai kebijakan nasional, maka kebijakan ini berlaku diseluruh dataran Cina, tidak terkecuali daerah daerah minoritas di Cina. Ketentuan ini dibuat dengan adanya kesepakatan yang sebelumnya terjadi antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat Cina, sehingga dapat ditentukan kebijakan ini akan diterapkan secara lokal atau nasional sekalipun (Hom, 1992:28).

Pemerintah provinsi Cina bertanggung jawab untuk mensterilisasi rahim setiap perempuan yang sudah pernah mengalami proses kehamilan. Hal tersebut dilakukan mengingat tujuan awal dari kebijakan satu anak ini adalah untuk mengontrol peningkatan jumlah populasi penduduk di Cina.

Tindakan aborsi paksa mendapat kecaman dari berbagai pihak, diantaranya adalah *All Women China Federation* (AWCF) yang menyatakan bahwa dengan

diberlakukannya kebijakan satu anak akan menyebabkan lebih banyak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di masa mendatang. Reggi Little John, seorang pakar kebijakan satu anak di Cina ini mengatakan, "*Forced abortions and forced sterilizations are unacceptable form of population control.*" (Schmidt, 2002:20). Pernyataan ini menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah Cina menyediakan forum publik untuk berdiskusi dengan masyarakat setempat, karena ketika ada kebebasan berbicara di suatu negara, maka orang-orang akan cenderung memilih cara diskusi yang lebih bersifat manusiawi dan seiring dengan berjalannya diskusi tersebut maka akan menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Faktanya, diberlakukannya kebijakan satu anak di Xinjian, dimana sekitar 70% dari penduduk di sebuah provinsi memperbolehkan adanya anak kedua di dalam keluarga mereka. Namun sangat disayangkan adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku misalnya saja jika anak pertama adalah seorang perempuan, barulah keluarga diperbolehkan untuk memiliki anak kedua yang diharapkan berjenis kelamin laki-laki. Karena menurut kepercayaan masyarakat tradisional di Cina, laki-laki dapat dijadikan pemimpin dan mempunyai *value* yang lebih apabila dibandingkan dengan perempuan (Schmidt, 2002:16).

Peraturan kebijakan yang mengharuskan para perempuan di Cina memperoleh ijin sebelum dirinya memilih untuk menjalani mengalami proses kehamilan. Para perempuan tersebut haruslah melakukan pemeriksaan panggul dan keadaan rahim mereka secara berkala untuk mengetahui apakah sebellumnya perempuan tersebut

sudah pernah mengalami proses kehamilan atau memang belum sama sekali. Hal ini dilakukan pada panggul wanita menggunakan *x-ray* sebanyak empat kali setahum untuk sekedar memastikan bahwa para perempuan tersebut bebas dari alat kontrasepsi, melakukan tindakan aborsi apabila hamil diluar sertifikat pemerintah serta kehamilan anak kedua yang terjadi tanpa adanya ijin dari pemerintah setempat (Schmidt, 2002:21). Ada konsekuensi yang harus diterima oleh kaum perempuan di Cina untuk melancarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pada umumnya kebijakan ini menyertakan hukuman maupun imbalan apabila sebuah keluarga mengikuti sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Hukuman atau sanksi jika ada keluarga yang melanggar kebijakan ini maka pemerintah Cina menetapkan aturan hukum sebagai berikut:

1. Aborsi wajib, yang sering disebut sebagai "langkah-langkah perbaikan" (*bujiu cuoshi*). (*US Congress*, Laporan Tahunan 2010).
2. Anak-anak lahir tanpa identitas rumah tangga (*hukou*) di Cina karena mereka lahir dan orang tua mereka tidak berencana membayar denda yang diperlukan. Kurangnya *hukou* yang sah menimbulkan hambatan untuk akses ke lingkungan sosial yang biasanya terkait dengan kesehatan bersubsidi dan pendidikan publik (*US Congress*, Laporan Tahunan 2010). Ada 300 ribu pejabat yang tugasnya adalah untuk menegakkan Kebijakan Satu-Anak, dan total 92 juta anggota yang membantu dengan penegakan hukum (Feng, 2005:26). Pejabat diberi struktur insentif keuangan untuk memenuhi kuota

aborsi dan sterilisasi, yang mengarah ke pemerasan dan pemaksaan (*US State Departmen Kemp-Kasten UNFPA Determination*, 2008:5).

3. Hukum menyatakan bahwa biro keluarga berencana akan melakukan tes kehamilan pada perempuan yang sudah menikah dan menyediakan "tindak lanjut" layanan. Beberapa provinsi memberikan denda bagi wanita yang tidak menjalani tes kehamilan periodic (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/eap/154382.htm).
4. Pada tahun 2008, warga Chongqing mengalami *out-of-cuota*, dikenakan denda antara 5.000 yuan (US $ 731) dan 10.000 yuan (US $ 1.464) jika mereka menolak untuk melakukan aborsi, di samping biaya kompensasi biasa sosial 2.000 yuan (US $ 293) menjadi 5.000 yuan (US $ 731) (http://www.cecc.gov/pages/annualRpt/annualRpt09/CECCannRpt2009.pdf).
5. Pada tahun 2008, sangsi beberapa pasangan dinilai dengan biaya kompensasi sosial sebesar 20% dari penghasilan pasangan dikombinasikan setiap tahun sekali selama tujuh tahun, untuk anak ketiga, denda naik menjadi 40% dari pendapatan gabungan selama 14 tahun, dan seterusnya (http://www.cecc.gov/pages/annualRpt/annualRp09/CECCannRpt2009.pdf).

Pemerintah daerah menawarkan insentif moneter untuk informan warga yang melaporkan pelanggaran peraturan perencanaan penduduk (Ebenstein, 2010:87-115). Sejak awal, kebijakan satu-anak telah menimbulkan kontroversi yang panjang. Para pendukung kebijakan bersikeras bahwa tanpa batasan ukuran yang ekstrim, pertumbuhan penduduk berkelanjutan akan dihadapi Cina, seorang politikus pasca-

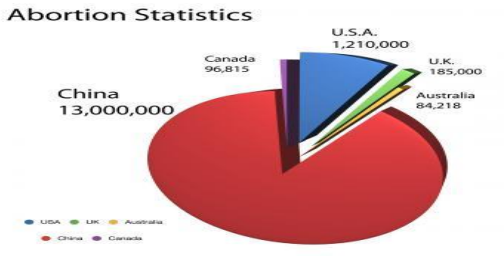
kepemimpinan Mao, juga berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan penipisan lebih lanjut sumber daya alam dan eksploitasi, dan kerusakan terhadap lingkungan. Sedangkan pihak yang menolak, memperingatkan biaya tinggi dan konsekuensi dari kebijakan seperti ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama wanita, perubahan kuat dari tradisi struktur keluarga nasional Cina.

Di satu sisi, kebijakan ini mempunyai sisi negatif dengan beberapa dampak yang dapat ditimbulkan. Akibat dari kebijakan ini, selama puluhan tahun lamanya terjadi kasus pengguguran secara sadis hingga mencapai 13 juta janin setiap tahunnya. Selama 31 tahun lamanya, sekitar 400 juta janin telah dibunuh. Kebijakan tersebut juga secara serius menyebabkan terjadinya ketidak-seimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Cina, fenomena penuaan usia masyarakat serta serangkaian masalah sosial lainnya pun bermunculan. Berikut perbandingan statistik tingkat aborsi di negara maju:

Gambar. 3.2

Statistik Aborsi di Negara Maju

Sumber:



http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/one-child-policy-abortions-in-china-most-are-forced-21819.html

Grafik diatas menunjukkan tingkat aborsi di beberapa negara maju, dimana tingkat aborsi terbesar dipegang oleh Cina, dengan rincian sebagai berikut:

- Di Australia, penelitian yang dilakukan oleh Australian Institute of Health and Welfare pada 2003 memiliki tingkat aborsi terendah dibanding negara lainnya (dalam grafik) yaitu sebesar 84.218 janin.
- Sementara itu Kanada menempati peringkat dua terendah dengan 86.815 janin.
- Di Inggris, yakni oleh U.K of Health Department pada tahun 2004 mencatat terjadi 185.000 janin.
- Di negara maju seperti Amerika Serikat, terjadi kurang lebih 1.210.000 janin diaborsi.
- Sedangkan di Cina terjadi sebanyak 13.000.000 janin terpaksa diaborsi. Yang menjadi faktor penyebabnya adalah adanya paksaan dari lingkungan luar yang mengharuskan mereka melakukan aborsi.

Meskipun masyarakat internasional terus mengecam bahwa kebijakan ini sangat bertentangan dengan HAM, dan melanggar standar penerapan "kelahiran berencana" yang telah diakui oleh dunia internasional, namun hingga saat ini para penguasa masih tetap menolak untuk menghapus kebijakan tersebut. Menurut angka statistik pemerintah, jumlah aborsi di Cina mencapai 13 juta jiwa setiap tahunnya, dan menempati urutan pertama di seluruh dunia. Harian *China Daily* yang mengutip penjelasan dari pekerja medis dan survei kedokteran mengatakan, jika termasuk kasus

aborsi yang belum tercatat atau kasus keguguran karena pengaruh obat-obatan, maka angka keguguran tersebut pasti akan jauh lebih tinggi.

Pasangan suami-istri yang membangkang aturan tersebut akan didenda sebesar gaji bulanan mereka selama beberapa tahun. Mereka juga tidak mendapatkan akses pelayanan sosial. Dijebloskan ke penjara adalah ancaman serius dari otoritas pemerintah. Anak yang dilahirkan karena pelanggaran kebijakan disebut "anak haram" karena tidak memiliki status hukum di Cina (Hayati, 2012).

Selain dampak yang ditimbulkan di atas, menurut standar internasional, 10 tahun lalu populasi penduduk di Cina telah memasuki masyarakat usia tua, dan sekarang semakin bertambah parah. Dari hasil sensus penduduk ke-6 pada 2011 ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 13,26% atau meningkat2,93% dibandingkan pada 2000, dan di antaranya yang berusia di atas 65 tahun mencapai 8,87% atau meningkat 1,91%. Sementara anak usia di bawah 14 tahun telah menurun sebanyak 6,29% dibandingkan dengan jumlah total penduduk Cina.

Usaha pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan "Satu Anak" memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap populasi penduduk Cina. Hal ini terbukti dengan penurunan jumlah kelahiran sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Pusat Riset Masalah Internasional dan Strategi Amerika belum lama ini menerbitkan laporan sensus penduduk yang diberi judul "Rambut Putih Cina: Analisa Populasi dan Ekonomi Terhadap Kebijakan Jompo Cina", memaparkan potensi masalah yang akan terjadi akibat pertumbuhan sosial masyarakat dan ekonomi

serta peralihan komposisi populasi Cina, yang jika tidak dipersiapkan secara matang, maka pada paruh akhir abad ini Cina diprediksi akan menghadapi masalah serius. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada 35 tahun lalu perbandingan jumlah anak-anak dengan orang tua di Cina adalah 6:1, dan 35 tahun kemudian yakni sekarang ini, perbandingan tersebut telah berubah drastis menjadi 1:2.

3.1.2.4 Kampanye *Women and Children First* tahun 2004

UNICEF merupakan salah satu Organisasi Internasional yang memfokuskan perhatianya pada perempuan dan kesejahteraan anak-anak Oleh sebab itu, UNICEF melakukan aksi-aksi dalam bentuk kampanye dan pernyataan-pernyataan yang dipublikasikan ke media internasional. Salah satu pernyataanya adalah UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang membantu mengatasi permasalahan kekerasan fisik maupun mental yang terjadi pada anak-anak dan perempuan di cina.

Pada tahun 2004, UNICEF meluncurkan tema kampanye *Woman and Children First* untuk membantu perempuan dan anak di seluruh dunia yang mengalami dikriminasi akibat situasi dan kebijakan politik di Negara-negara dunia ketiga. Kampanye ini diluncurkan setelah pertemuan puncak UNICEF yang mengumpulkan hasil dan laporan semua negara anggota terkait kondisi perempuan dan anak.

Upaya dalam bentuk kampanye anti kekerasan bertujuan untuk merealisasikan tujuan UNICEF yaitu meminimalisir tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di Cina.

Di Cina sendiri terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi akibat masih diberlakukannya kebijakan satu anak hingga saat ini. Contoh dari

tindakan kekerasan di sini adalah dapat berupa gagalnya praktik aborsi, pemasangan alat kontrasepsi yang salah pada organ vital perempuan, tindakan seleksi (pembunuhan) janin yang berjenis kelamin tertentu, dan rasio jenis kelamin yang tidak sebanding secara pesebaran. Kampanye ini di Cina bertujuan agar masyarakat dan keluarga-keluarga di Cina tidak lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan (http://www.xinhuanet.com/english2010/video/2011_10/27/c_131215267.htm). UNICEF dalam hal ini mengkampanyekan anti kekerasan menggandeng *All Girls Allowed* (AGA). (Eberstadt, 2011:15).

UNICEF mencoba menyadarkan pemerintah setempat dan di Cina serta merubahi kembali cara berfikir warga Cina tentang kesetaraan gender itu sendiri, menegakkan kembali hak asasi dan keadilan bagi para kaum perempuan dan anak di Cina (Schmidt, 2002:29). UNICEF memulai aksinya dengan melakukan tindakan advokasi yang diawali dari para perempuan yang tinggal didaerah terpencil. Melakukan pembekalan pengetahuan dan penyuluhan yang berguna untuk pembelaan diri (*self defense*) di kala sewaktu-waktu mendapatkan tindakan kekerasan.

Di sisi lain, dalam melakukan kampanye "*Women and Children first*" UNICEF berusaha mengubah cara berfikir masyarakat setempat terutama perempuan di Cina. Bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan kehidupan layak dan hak yang sama sebagai manusia, sama halnya dengan kehidupan anak nakal. UNICEF berepedoman pada deklarasi hak anak yang mengatakan bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan kehidupan layak seorang anak berhak untuk hidup. Bertumbuh kembang seutuhnya layaknya sebagai manusia. Oleh sebab itu UNICEF

mengharapkan melalui kampanye "*Women and Children first*" akan mengurangi tingkat tindakan kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak di Cina. Dengan adanya pengurangan jumlah kematian pada perempuan di Cina, otomatis mempengaruhi angka kematian pada perempuan dan anak di dunia internasional, karna tidak jarang angka kematian seringkali disebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan dilingkungan sekitarnya.

Kampanye *Women and Children First* merupakan pendekatan berbasis kesetaraan hak asasi dalam bermasyarakat dan bernegara (Schmidt, 2002:23). Maksudnya adalah sebuah kerangka kerja konseptual sebagai proses pembangunan manusia secara normatif yang didasarkan pada standar hak asasi manusia dan secara kinerja operasionalnya diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi kaum perempuan dan anak-anak di Cina (Zhingang, 2002:1-11).

UNICEF juga tidak melibatkan peran pemerintah setempat dalam poses pengambilan keputusan (*decision making*), UNICEF berhak untuk merekomendasikan solusi yang akan dijadikan jalan tengah untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cina. Melalui kampanye *Women and Children First,* peran UNICEF menunjukkan sebagai aktor yang merupakan faktor penentu yang sangat penting, hal ini ditunjukkan melalui bagaimana cara UNICEF mengadvokasi pemerintah bahwa kebijakan yang dicanangkan telah menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan dan anak-anak di Cina dan menghimbau untuk membenahi sistem kebijakan di dalamnya dan memperketat pengawasan terhadap praktek aborsi di Cina.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh UNICEF dan berbagai sumber-sumber yang relevan dan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional. Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan masalah yakni dimulai tahun 2001, dimana UNICEF merancang suatu program kampanye bertujuan untuk menekan angka kekerasan perempuan di Cina. Tahun 2004, yaitu dimulainya kampanye *Women and Children First* dan peneliti mengambil rentang waktu 2004-2008 untuk mengetahui sejauhmana kampanye ini mampu menekan jumlah kekerasan perempuan dan anak di Cina.

3.2.1.1 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai informan adalah sebagai berikut :

1) Perwakilan UNICEF Indonesia. Peneliti berharap Pihak UNICEF melalui perwakilan Indonesia mampu mengenai hal-hal mengenai implementasi kampanye UNICEF di Cina.
2) Kedutaan Besar Cina di Jakarta. Peneliti berniat melakukan wawancara seputar kebijakan satu anak dan beberapa hal mengenai pelaksanaan kerjasama serta peran Negara sendiri.
3) Pusat Studi Cina (*Centre for Chinese Studies*) Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya di Universitas Indonesia. Jika memungkinkan, penulis ingin meneliti cara pandang terhadap kebijakan satu anak ini dari perspektif non birokrat atau secara akademis.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan, Penelusuran data online, Dokumentasi, dan Wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada peran suatu organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan di Jepang dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

Studi Kepustakaan, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaan teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Penelusuran data online, peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

Metode Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive*. Yaitu peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan UNICEF yaitu dalam hal ini peneliti akan bertemu dengan perwakilan UNICEF di Jakarta yang relevan dalam studi mengenai kekerasan perempuan dan anak.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya:

a. Perwakilan UNICEF di Indonesia, Wisma Metropolitan II, Lt.10 Jalan Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Pusat (12920)
b. Pusat Studi Cina (*Centre for Chinese Studies*) Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya di Universitas Indonesia. Kampus UI Depok, Jawa Barat
c. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Jalan Ciumbuleuit Bandung
d. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur, Bandung

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sepuluh bulan terhitung dari bulan Nopember sampai dengan bulan Agustus 2013.

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Penelitian									
		2012		2013							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
1.	Pengajuan Judul										
2.	Pembuatan Usulan Penelitian										
3.	Seminar Usulan penelitian										
4.	Bimbingan Skripsi										
5.	Pengumpulan Data										
6.	Sidang										